

NOTULA

Penyampaian Usulan UCLG-ASPAC untuk RAN OGI 2020- 2022

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2020
Pukul : 09.00 – 10.30 WIB
Tempat : Zoom Meeting
Agenda : Penyampaian Usulan UCLG-ASPAC terkait Ruang Terbuka Hijau untuk RAN OGI 2020- 2022

Moderator : Seknas OGI
Peserta : Direktorat Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana
Direktorat Regional II
Direktorat Pembangunan Daerah
Tim UCLG-ASPAC
Tim Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi Rapat

1. Perwakilan Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar terkait Open Government Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sebagai berikut:
 - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.
 - b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.

2. Bapak Rendy sebagai perwakilan UCLG-ASPAC menjelaskan beberapa poin terkait rencana aksi yang diusulkan, sebagai berikut:
 - a. Rencana yang akan dilakukan di tahun 2021-2022 adalah proyek di Klaten khususnya di sekitar Candi Plaosan dan di Jakarta khususnya di bawah flyover Klender serta proyek pembangunan paska bencana di Palu. Pengembangan ruang publik ini sudah sejalan dengan RPJMN tentang penyediaan ruang secara fisik, serta tentang transportasi terutama di Klender.
 - b. Ada beberapa proyek yang sudah dilakukan UCLG-ASPAC sebelumnya. Biasanya proses perencanaan dilakukan selama satu tahun dan selanjutnya proses pembangunan. Proses perencanaan meliputi mencari lokasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama pelibatan masyarakat. Proses partisipatif ini dilakukan dengan mencoba melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan ruang publik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Open Government Indonesia yakni nilai partisipatif dan inklusi.
 - c. Rencana pemulihan Palu dilakukan dengan menggalang dana bersama anggota UCLG-ASPAC di Perancis untuk membangun ruang terbuka publik dalam rangka mengenang bencana. Namun, ada kendala dari pemerintah Kota Palu karena belum ada penetapan lokasi. Selain itu, tidak ada kepastian dari pemerintah pusat dan daerah terkait ganti rugi berupa uang tunai dan hunian tetap.
 - d. Dari pihak Kementerian PUPR juga belum memberikan respon dan gambaran secara utuh. Sementara itu, pemerintah di lapangan khususnya Palu, sudah menyebutkan adanya *masterplan* dari Kementerian PUPR. Jika *masterplan* memang sudah ada, maka UCLG-ASPAC harus mengikuti arahan Kementerian PUPR.
 - e. Pemerintah kota Palu memberikan saran bahwa pembangunan bisa dilakukan di hutan kota yang aman. Namun, UCLG-ASPAC ingin mendapatkan alternatif lokasi lainnya. Rencananya, di bulan April 2021 sudah ada progress pembangunan di kota Palu.
 - f. Terkait proyek di Candi Plaosan, masih ada kendala untuk masuk ke Kabupaten Klaten karena bupati sebelumnya terjerat korupsi sehingga bupati yang sekarang tidak merespon usulan UCLG-ASPAC. Akhirnya,

UCLG-ASPAC masuk melalui jalur provinsi yakni Pak Ganjar tapi belum ada follow-up.

- g. Proyek di Klaten juga masuk dalam situs Arkeologi milik Dirjen Kebudayaan. Oleh karena itu, Kemendikbud juga perlu diundang Bersama Kementerian PUPR dan Kementerian PPA karena salah satu syarat adalah keterlibatan perempuan. Proyek ini akan menjadi *best practices* yang berbeda karena adanya intervensi ruang public.
3. Bapak David sebagai perwakilan UCLG-ASPAC menambahkan beberapa poin terkait rencana aksi yang diusulkan, sebagai berikut:
 - a. Banyak urusan di Kota Palu yang tumpang tindih. Ada banyak program yang belum *clear* untuk dijalankan. Pendekatan yang sudah dilakukan UCLG-ASPAC adalah *top down* dan *bottom up*. UCLG-ASPAC sudah mendatangi hampir seluruh instansi dari Balai Cipta Karya, ATR BPN, hingga pemerintah kota Palu. Balai Cipta Karya, dalam hal ini, sudah menyatakan akan mendukung UCLG-ASPAC 100%. Namun, dalam *grand design Balaroa*, bagian UCLG-ASPAC masih belum ditentukan.
 - b. Hal yang diperlukan saat ini adalah mendudukkan kementerian terkait khususnya legalitas urusan tanah di Kota Palu. Ditambah dengana adanya SOTK yang baru, maka PoC menjadi berubah.
 - c. Kota Palu bukan merupakan anggota langsung UCLG-ASPAC, tapi anggota melalui APEKSI. Dalam hal ini, Kemendagri juga memiliki peran vital agar bantuan ini tidak dijadikan alat bagi salah satu calon walikota di Palu.
4. Ibu Lenggo dari Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana memberi tanggapan, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan paska bencana sudah menjadi komitmen pemerintah pusat di kota Palu. Namun, masih ada masalah di Kota Palu, Sigi, dan Donggala terkait penetapan kompensasi bagi masyarakat. Setelah bencana, memang ada hunian tetap di Duyut, Tondo, Talise, Mamboro. Namun, kompensasi lainnya terlambat untuk diproses.
 - b. Program di Palu akan tetap diproses dan dikawal dengan menggunakan *modal social* menjadi salah satu penilaian dalam mengambil keputusan yang tepat. Tantangan yang ada adalah bentuk RTH yang akan dibangun dan masyarakat yang heterogen di Palu. Selain itu, kepemilikan tanah yang

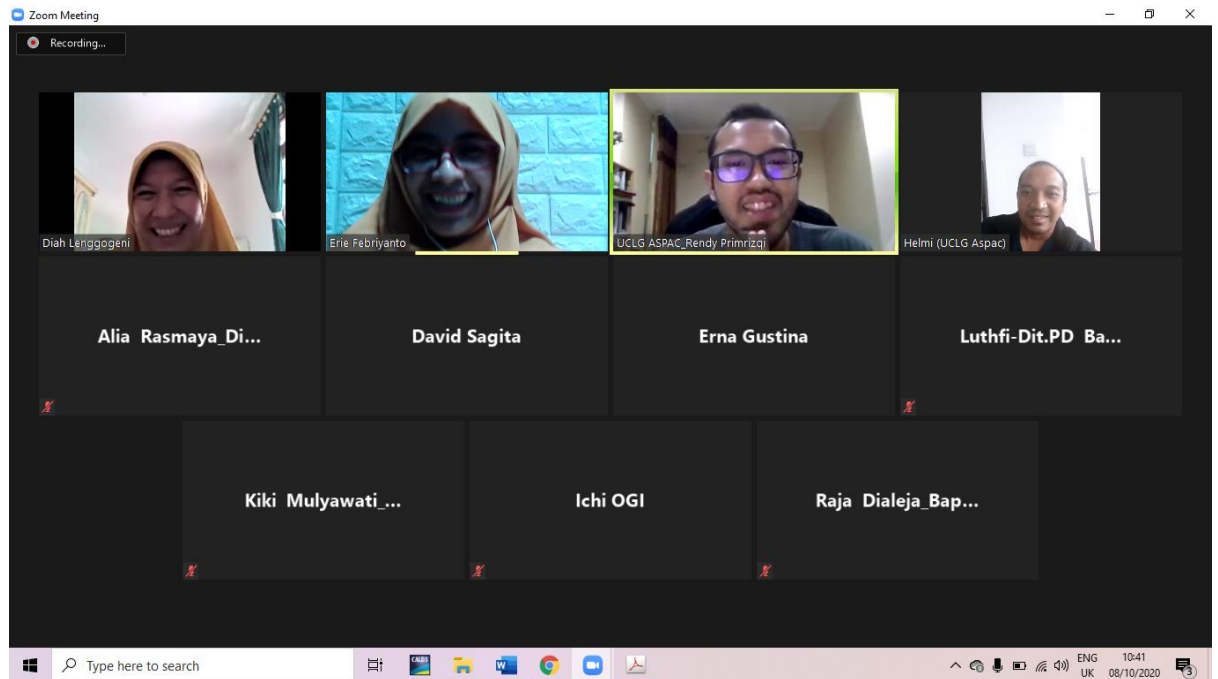
berbeda antara Kota Palu dan Provinsi juga menjadi masalah. Perlu ada penentuan terkait tahapan apa yang bisa dilakukan agar ada *consensus* menggunakan pendekatan berbasis komunitas.

- c. Sudah ada Rencana Induk Pemulihan Bencana yang diregulasikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. Di tingkat Kota, juga ada regulasi turunan. Namun, ketika dibagi menjadi 5 sektor utama, kontributor utamanya adalah PUPR yang menerjemahkan lagi untuk wilayah yang akan dibangun. Dalam hal ini, rencana pembangunannya menjadi dikawal penuh oleh pemerintah sehingga perlu ada penyesuaian model karena selama ini bersifat *top down* dari PUPR ke Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, perlu ada informasi kepada PUPR terkait pendekatan berbasis komunitas.
5. Ibu Erna dari Direktorat Regional II menambahkan beberapa catatan, sebagai berikut:
 - a. Perlu adanya pemetaan *stakeholder* baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah serta pemetaan komunitas yang akan dilibatkan. Pelibatan tersebut tidak hanya di tahap perencanaan, tapi juga pelaksanaan dan evaluasi, serta pengawalan kelestarian fisik dan bangunan.
6. Ibu Maya dari Direktorat Pembangunan Daerah menambahkan beberapa catatan, sebagai berikut:
 - a. Terkait RTH, Dit. PD sedang memperbaiki metadata SDGs 11.7.1 dengan memetakan *stakeholder* terkait RTH. Namun, saat ini masih dalam tahap pengumpulan data RTH di seluruh kota. *Stakeholder* yang terlibat saat ini adalah LAPAN untuk RTH yang sudah ada.
7. Bapak Luthfi dari Direktorat Pembangunan Daerah menambahkan beberapa catatan, sebagai berikut:
 - a. Proyek Candi Palaosan berkaitan dengan pelestarian dan konservasi di SDGs, sehingga Dit. Perdesaaan perlu diundang. Proyek ini juga terkait dengan desa wisata sehingga Direktorat IPTEK perlu diundang.
 - b. Secara umum, proyek ini akan menjadi model RTH yang dapat dikembangkan di berbagai daerah lainnya.

III. Tindak Lanjut

1. Rapat selanjutnya terkait Palu akan mengundang:
 - a. Kementerian PUPR khususnya - Bina Teknik Jalan dan Jembatan; Direktorat Bina Penataan Bangunan; dan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (**Pak Edward**).
 - b. Kemendagri khususnya Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
 - c. ATR BPN khususnya Direktorat Pemanfaatan Ruang.
 - d. Pemerintah Kota Palu.
2. Rapat selanjutnya terkait Candi Plaosan akan mengundang
 - a. Direktorat Regional I
 - b. Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan
 - c. Kemendikbud khususnya Direktorat Pelindungan Kebudayaan
 - d. Kementerian Pariwisata khususnya Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif.

IV. Dokumentasi



Zoom Meeting
Recording...

Diah Lenggogeni

Erie Febriyanto

UCLG ASPAC_Rendy Primrizqi

Alia Rasmaya_Dit. PD Bappenas

David Sagita

Helmi (UCLG As...

Erna Gustina

Luthfi-Dit.PD Ba...

Kiki Mulyawati_...

Ichi OGI

Raja Dialeja_Bap...

Type here to search
Zoom Meeting
ENG UK 10:40 08/10/2020

Erie Febriyanto
UCLG ASPAC_Re...

Diah Lenggogeni
David Sagita
Erna Gustina
Luthfi-Dit.PD Ba...

JAKARTA

- Pemanfaatan Ruang Mati di Kolong Jembatan Klender untuk menjadi *hub* bagi lingkungan sekitarnya

KABUPATEN KLATEN

- Membangun RTH di area Candi Plaosan yang dapat dimanfaatkan oleh publik

KOTA YOGYAKARTA

- Mengembangkan platform pasar digital sebagai ruang publik virtual dan membantu menghidupkan kembali kegiatan pasar yang sempat terpuruk akibat pandemic COVID-19

KOTA SURABAYA

- Menjadikan Balai Budaya Cak Markeso sebagai pusat pembelajaran penanganan COVID-19 berbasis *low-tech*.
- Pendataan dan Pemetaan Penduduk berbasis Komunitas juga menjadi salah satu kegiatan di Surabaya

KOTA PALU

- Sebagai salah satu bentuk dukungan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu pasca bencana di 2018.
- Membangun ruang publik secara partisipatif.

UCLG ASPAC
UN HABITAT FOR A BETTER URBAN FUTURE
ENG UK 9:44 08/10/2020